

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ibadah yang diproyeksikan sebagai media untuk menggapai kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tujuan mulia ini setidaknya semakin mudah dicapai jika didukung pasangan yang ideal, yaitu ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih) antara kedua belah pihak. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan utama dalam perkawinan. Salah satunya adalah dengan mencari calon suami/istri yang baik. Upaya tersebut bukanlah sebuah harga mati, tetapi keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam kelangsungan membangun rumah tangga.

Dasar yang penting dalam membangun bahtera rumah tangga adalah cinta, karena cinta merupakan tanda ketertarikan manusia terhadap pasangannya sehingga terasa kesatuan emosional dan spritual. Maka dari itu, setiap orang memiliki daya tarik tertentu di samping selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik ada yang bersifat lahir seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan, pangkat atau nama besar. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dalam berbagai ciri kepribadian lainnya. Selera manusia juga berbeda-beda,

adayang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang selernya ada pada kualitas hati.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan *kafa'ah* atau biasa disebut dengan *kufu'*. Kafa'ah berarti sama sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya sama dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlaq maupun kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin dari kegoncangan rumah tangga.

Salah satu tujuan dari kesimbangan dan keserasian di atas adalah agar antara calon suami dan calon isteri masing-masing tidak merasakan paksaan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa tarad *sekufu'*, merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan pasangan suami isteri.

Al-Quran mengisyaratkan agar memilih pasangan terbaik dalam surat al-Nur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيَّاتُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 117.

<sup>2</sup> Fadhal AR Bafadal dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung Sygma Examedia Arkanleema, 2006), 280.

Begitupun Rasulullah Saw mengisyaratkan memilih pasangan dengan kriteria dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ.

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan 'Ubaidulloh bin Sa'id mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dai 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."<sup>3</sup>

Maka dari itu keberadaan *kafa'ah* di pandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan setiap masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari mulai segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak ditemui adanya ketidakcocokan dan ketimpangan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

<sup>3</sup>Imam Muslim, *Hadits Shahih Muslim*, (Lidwa Pustaka: Kitab sembilan Imam Hadits). No. 2661.

Maka sangatlah wajar apabila di tengah-tengah masyarakat sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan adalah hal yang sangat diperhatikan, karena mereka mengharapkan pernikahan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Biasanya masyarakat melihat tiga faktor dalam pertimbangannya yaitu bobot, bibit dan bebet.

*Fuqoha* berbeda pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, banyak hal yang diperhitungkan dalam merumuskan *ke-kufu'an* seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mempunyai pendapat yang sama mengenai ukuran *ke-kufu'an* yaitu dilihat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal kekayaan atau harta. Madzhab Hanafi dan Hanbali bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur *ke-kufu'an*. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan termasuk unsur *ke-kufu'an*.<sup>4</sup> Menurut Madzhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep *ke-se-kufu'an* seseorang. *Fuqoha* juga berbeda pendapat mengenai *kafa'ah* termasuk syarat sahnya perkawinan atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat sahya perkawinan.<sup>5</sup>

Ulama Kontemporer seperti Sayid Sabiq sebagai tokoh pembaharu hukum Islam dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan ada enam hal yang harus diperhatikan dalam menilai *ke-kafa'ahan* seseorang diantaranya; a) keturuana, b)

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Maghniayah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-'Ilmi Lil al-Malayin, 1964), 42.

<sup>5</sup> Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 53

kemerdekaan, c) agama, d) kekayaan dan e) kondisi jasmani.<sup>6</sup> Terlihat pendapat Sayid Sabiq lebih rinci di banding dengan para ulama terdahulu. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I dalam menjelaskan Pencegahan Perkawinan BAB X pasal 61 dijelaskan bahwa tidak *se-kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu'* karena perbedaan agama.<sup>7</sup>

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama terkadang berbeda dengan penerapannya, salah satunya terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' Cianjur Jawa Barat yaitu salah satu Pondok Pesantren *salafiyah* terbesar di daerah Jawa Barat. Santrinya tidak kurang dari 1500 orang dan kyai sepuhnya pun tidak kurang dari 10 kyai ditambah dengan kyai muda dan asatidz yang mengajar di pesantren tersebut. Meskipun Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' termasuk pesantren *salafiyah* yang terkenal dengan kitab kuningnya tetapi dalam metode pembelajarannya sudah menggunakan metode modern, karena dalam sistem kurikulum pesantren sudah menggunakan kelas, dari mulai kelas *iddadiyah* (setingkat TK/persiapan), *Ibtidaiyah* (setingkat SD), *tsanawiyah* (setingkat SMP/MTS), *'aliyyah* (setingkat SMA), *mahad 'ali* (setingkat sekolah tinggi) dan dirosatul 'ulya (setingkat pascasarjana). Begitu pun dalam hal bahasa, *sains* dan teknologi di Pondok Pesantren ini semuanya dipelajari. Maka dilihat Pondok Pesantren ini meskipun terkenal dengan Pondok Pesantren *Salafiyah* tetapi dalam praktek pembelajarannya sudah bisa dikatakan Pondok Pesantren Modern atau dengan

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 36.

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), 95.

kata lain “Semi Modern”, yaitu perpaduan antara Pondok Pesantren *Salafiyah* dan Pondok Pesantren Modern.

Di Pondok Pesantren ini Kyai adalah tokoh sentral. Selain sebagai pemimpin, mereka adalah guru, suri tauladan dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang sangat substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama baik di pesantren itu sendiri maupun di masyarakat sekitar pesantren. Salah satunya dalam konsep perihal *munakahat* atau perkawinan, yang mana hal yang satu ini benar-benar diperhatikan oleh para kyai di Pondok Pesantren ini. Terlihat dari adanya pengurus khusus pesantren yang mengurus perijodohan, perkawinan bahkan pemuqiman santri, dengan adanya program Pemuqiman dan Perkawinan.

Para santri apabila telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang *Mahad* ‘*Aly* atau setingkat sekolah tinggi biasanya kyai akan menawarkan jodoh untuknya karena sudah dipandang layak untuk melakukan pernikahan dan para santri biasanya tidak berani untuk menolaknya. Terbukti hasil wawancara penulis dengan lebih dari 15 santri dari berbagai tingkat dan kelas, ketika ditanya “apabila kyai memberikan tawaran jodoh, akan diterima atau tidak?” mereka menjawab dengan kata-kata yang hampir sama yaitu dengan kalimat *sam’an wa thoa’tan*.<sup>8</sup> Artinya mereka siap menuruti apa yang diperintahkan/ditawarkan oleh sang kyai.

Penentuan *kafa’ah* merupakan hak mereka yang akan melaksanakan perkawinan baik pihak wanita, pihak laki-laki maupun walinya. Untuk menentukan bagaimana latar belakang orang yang hendak dinikahinya. Sebab dengan adanya

---

<sup>8</sup> Muhammad, dkk, (santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri’Cianjur), wawancara oleh Achmad Zainal Abidin, tanggal 23 Mei 2019.

perkawinan akan melahirkan keturunan. Maka apabila pihak wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan atau *se-kufu'*, maka wanita tersebut berhak menolaknya.<sup>9</sup>

Konsep *kafa'ah* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren ini terlihat sangat berbeda dengan konsep yang telah dirumuskan oleh *fuqoha* seperti keagamaan, kemerdekaan, profesi, keturunan dan kekayaan. Karena di Pondok Pesantren ini yang menjadi rujukan dalam menjodohkan santrinya ialah ilmu. Meskipun calon mempelai laki-laki miskin dan calon mempelai wanitanya kaya atau calon mempelai laki-lakinya dari keturunan baik dan calon mempelai wanita dari keturunan kurang baik. Maka hal tersebut tidak menjadikan halangan dalam perjodohan yang selanjutnya kepada jenjang perkawinan. Karena hanya satu kriteria yang harus ada yaitu ilmu atau dengan bahasa lain kedua mempelai harus sama-sama mendalami keilmuan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri.

Tetapi disisi lain dari hasil pengamatan penulis, ternyata tidak setiap santri yang dijodohkan oleh dewan kyai dalam menjalani kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik. Ada diantaranya yang menjalani kehidupan keluarganya kurang baik. Sebagai contoh, Kang MM (nama disamarkan) sesuai pengakuannya dari mulai berkeluarga ada saja permasalahan yang dihadapi dalam berkeluarga dikarenakan masalah utamanya dari status keluarga yang berbeda.<sup>10</sup>

Pada paparan di atas terlihat sangat jelas adanya perbedaan dalam pelaksanaan konsep *kafa'ah* yang telah disepakati *fuqoha* dengan pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

<sup>10</sup> MM (Alumni Pesantren Miftahul Huda Al-Musri?), wawancara oleh Achmad Zainal Abidin, Desember 2018.

*kafa'ah* di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' Cianjur. Yang mana hal tersebut di mungkinkan akan adanya hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh santri atau alumni yang telah melangsungkan pernikahan. Salah satunya dikarenakan adanya perbedaan dalam segi kekayaan maupun latar belakang keluarga (nasab). Sebagaimana hasil pengamatan penulis selama penelitian ternyata dari sekian jumlah santri/ alumni yang di jodohkan oleh kyai dan menikah, Ada diantaranya yang kurang harmonis, dikarenakan sebelumnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya dalam berbagai aspek, dan ternyata ketika menjalani pernikahan banyak sekali perbedaan. Dalam aspek sosiologis pun terlihat sangat terbatasnya hak santri untuk menentukan jodoh terbaiknya.

Penulis yakin bahwa para kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' sangat paham mengenai hukum *syariat*, terutama perihal hukum perkawinan dalam Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi mengapa mereka menentukan jodoh santrinya padahal disisi lain, para santri sangat bisa mencari dan menentukan pasangan hidupnya sendiri. Begitupun para kyai dalam menentukan pasangan hidup santrinya hanya mengedepankan satu unsur dalam menjadikan pertimbangan utama yaitu ilmu. Apa yang melatar belakangi hal tersebut?.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang menjadikan penulis mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.



## B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka jelas pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Di satu sisi para *fuqoha* memberikan konsep secara jelas dalam penentuan *kafa'ah* di dalam memilih calon pendamping, dan siapapun calon pasangan berhak memilih sendiri untuk menentukan pendamping terbaiknya. Di sisi lain di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' dalam penentuan dan pelaksanaan *kafa'ah* berbeda dengan *fuqoha*, padahal Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' ini termasuk Pondok Pesantren *salafiyah* yang mana sangat kental dengan pemahaman kitab kuningnya (kitab *fuqoha*). Tetapi dalam menentukan pendamping bagi para santrinya mereka hanya memperhatikan satu unsur yaitu keilmuan, dengan kata lain calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita harus sama-sama santri yang belajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'.

Dari permasalahan pokok di atas, dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' ?
2. Apa faktor yang menjadikan para santri menerima pilihan calon pendamping hidupnya yang dipikirkan oleh Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*fiqh*) dan sosiologis terhadap pelaksanaan *kafa'ah* di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep *kafa'ah* menurut Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'.
- b. Mengetahui faktor yang menjadikan para santri menerima pilihan calon pendamping hidupnya yang di pilihkan oleh Dewan kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'
- c. Mengetahui tinjauan hukum Islam (*fiqh*) dan sosiologis terhadap konsep dan penerapan *kafa'ah* Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafa'ah*. Sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam (*fiqh*) yang nantinya bisa direalisasikan dalam kehidupan.

Kegunaan dari sisi akademis, diharapkan penelitian ini berguna bagi peningkatan dan pengembangan potensi akademik penulis khususnya dan umumnya bagi semua, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang selama ini diminati dan ditekuni.

#### D. Kajian Pustaka

Studi dan penelitian tentang kafa'ah memang bukan yang pertama kali dilakukan, tetapi sudah banyak yang melakukan penelitian. Akan tetapi sekalipun objek kajian penelitian sama, yang menjadi fokus penelitiannya berbeda sebagaimana dijelaskan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui letak posisi penelitian ini dengan beberapa studi yang dilakukan sebelumnya, berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *kafa'ah*.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sulhani Hermawan, dengan judul *Al-Kafa'ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafa'ah)*.<sup>11</sup> Tesis ini menggunakan teori sejarah dan teori klasifikasi hukum dan asas-asas yang berlaku, egalitarian dan kesetaraan hak asasi manusia. Di dalamnya dijelaskan mengenai persoalan *kafa'ah* dengan memakai prinsip kemaslahatan dan membahas historis adanya dukungan dan penolakan terhadap konsep *kafa'ah* secara normatif dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Armen Siregar dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Konsep Hanafiyah dan Zahiriyah*.<sup>12</sup> Tesis ini menggunakan pendekatan normatif-historis, dan menggunakan teori *jam'u wa al-taufiq*

---

<sup>11</sup> Sulhani Hermawan, *Al-Kafa'ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafa'ah)*, (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

<sup>12</sup> Armen Siregar, *Kafa'ah dalam Konsep Hanafiyah dan Zahiriyah*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

(mengumpulkan dan mempertemukan), *nasakh* dan *tarjih*. Di dalamnya dijelaskan bahwa menuet Hanafiyah *kafa'ah* bukanlah sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Menurut Zahiriyah semua orang Islam bersaudara dan setiap orang Islam mempunyai derajat yang sama termasuk dalam menentukan pasangannya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi dengan judul *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)*.<sup>13</sup> Tesis ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergeseran makna kafa'ah dalam ranah sosial disebabkan oleh beberapa faktor, yang kemudian direalisasikan ke dalam beberapa teori yaitu teori struktural dan fungsionalis. Bahwa di dalam pernikahan dibutuhkan keserasaan bukan hanya keserasian untuk menjadi pasangan yang ideal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Makhrus Munajat dengan judul *Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)*.<sup>14</sup> Karya Ilmiah ini menjelaskan pandangan para fuqoha klasik tentang konsep *kafa'ah* secara umum. Yang mana terjadinya perbedaan pendapat di kalangan *fuqoha* disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil *syara'* baik dari al-quran dan al-sunnah. Selain itu kondisi masyarakat dan lingkungan sangat mempengaruhi pemikiran fuqoha dalam menentukan sebuah hukum tak terkecuali tentang konsep *kafa'ah*. Dalam kesimpulannya dijelaskan, di dalam Islam

---

<sup>13</sup> Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)*, (Malang: Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2011).

<sup>14</sup> Makhrus Munajat, *Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)*, (Jurnal Penelitian Agama, vol. 4 No.20, 1998).

ketentuan atau norma-norma kafa'ah tidak dijelaskan secara rinci kecuali dalam hal agama dan akhlaq.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Iffatin Nur dengan judul *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah dalam Al-Quran dan Hadits*.<sup>15</sup> Karya Ilmiah ini menjelaskan bahwa persoalan kafa'ah menyangkut keturunan, kekayaan, tingkat pendidikan, kondisi jasmani dan rohani. Penentuan kafa'ah tidak lagi hak periogatif wali perempuan.

#### E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, sebagaimana cara shalat, zakat, puasa maupun haji. Dimensi horizontal mengatur hubungan manusia yang bersifat *muamalah*. Di dalamnya terdiri dari hukum pidana (*jinayat*), hukum perkawinan (*munakahat*), politik (*siyasat*). Berkaitan dengan hukum perkawinan (*munakahat*) persoalan kafa'ah adalah salah satu bagian yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam ialah al-quran dan al-hadits, juga terdapat dua sumber yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber ini biasa disebut *Mashodir al-Tasyri'iyah li al-ahkam*.<sup>16</sup> Sementara itu *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka kitab *fiqh* merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran *fuqoha*. Pada dasarnya tujuan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan

<sup>15</sup> Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah dalam Al-Quran dan Hadits*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol.8 No. 65, 2012).

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp: Dar al-Qolam, 1978), 20.

manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*tahsiniyat*). Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka akan terwujud kemaslahatan.

Dalam mengatur *kafa'ah* hukum Islam tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tentram/bahagia) yang penuh dengan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Maka adanya ketentuan atau konsep *kafa'ah* tentu untuk mewujudkan tujuan tersebut.<sup>17</sup>

Di dalam *fiqh*, *kafa'ah* ialah keserasian atau kecocokan (*mumatsalah*) antara pasangan suami istri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. *Fuqoha* merumuskan unsur-unsur yang berbeda dalam masalah *kafa'ah*. Pendapat Jumhur ulama (mayoritas ulama) menyebutkan bahwa unsur agama, nasab, status kemerdekaan, profesi sebagai hal yang harus diperhitungkan. Menurut madzhab Maliki unsur yang menjadi ukuran ke *sekufu'an* hanyalah kesholihan, ketaqwaan dan tidak cacat (*'aib*). Sedangkan madzhab Hanafi merumuskan dalam hal *kafa'ah* harus memiliki enam kategori dalam menetapkan *kekufu'an*, diantaranya: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*hurriyah*), harta (*mal*), kekuatan moral (*dinayah*), dan profesi /pekerjaan (*hirfah*). Madzhab Syafi'i sebagaimana yang diterangkan Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i menekankan sang calon bersih dari cacat (*'aib*) dan menekankan pada unsur kemerdekaan. Tetapi Madzhab Syafi'i tidak menekankan pada unsur kekayaan sebagai kriteria dari

---

<sup>17</sup> A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Cerai dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11.

*kafa'ah*. Selanjutnya Abu Zahrah menerangkan bahwa Madzhab Hanbali dalam kriteria di dalam *kafa'ah* sama dengan Madzhab Syafi'i.<sup>18</sup>

Penentuan kriteria *kafa'ah* merupakan hasil ijtihad karena di dalam penentuannya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ingin mewujudkan kemaslahatan. Faktor sosiologis sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya, karenanya pendekatan sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah penelitian ini sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

Melakukan evaluasi suatu hukum yang ada atau berlaku, merupakan salah satu bagian dari sosiologi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum harus ada sesuai dengan fungsinya sebagai satuan organisme yang kompleks. Sehingga struktur, substansi hukum dan kultur hukum bisa berjalan secara beriringan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>19</sup> Penulis memahami apabila salah satu bagian dari sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan sangat sulit sekali dalam mencapai tujuan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum pada struktur hukum yang dimaksud adalah suatu kerangka pada lembaga yang berwenang untuk membuat dan menjalankan suatu hukum seperti hakim pengadilan dan institusi lainnya. Sementara itu, substansi adalah peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi', 1954), 63.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 312.

kultur atau budaya hukum ialah sikap atau nilai sosial, yang dilihat ialah kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya.<sup>20</sup>

Adapun sistem hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'. Sedangkan konsep *kafa'ah* yang digunakan merupakan bagian dari substansi hukum dan respon atau tanggapan masyarakat yang membutuhkan dan membuat tuntutan-tuntutan akan adanya lembaga tersebut adalah bagian dari kultur hukum.

Perlu dipahami fungsi dari sistem hukum ialah untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat, dimana kebenaran menurut masyarakat itu adalah suatu keadilan. Fungsi lainnya ialah untuk menyelesaikan konflik, sebagai sosial kontrol primer (pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar) dan kontrol sekunder (menasehati, memberi pelajaran dan merehabilitasi).<sup>21</sup> Jika fungsi-fungsi ini tidak berjalan maka dapat dikatakan tujuan sistem hukum tersebut akan sulit dicapai.

Sistem hukum dalam hal substansi hukum digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah pendapat *fugoha* mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Penggunaan teori ini memberikan jawaban tentang bagaimana peraturan dalam pelaksanaan *kafa'ah* perkawinan, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan di atas. Kemudian juga akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri Cianjur. Dari teori ini juga memperlihatkan jawaban dari budaya

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah, M. Khozim, (Bandung, Nusa Media, 2013). 15-16.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 19.



hukum, yaitu terkait sikap dan tanggapan masyarakat atas pelaksanaan konsep *kafa'ah* di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri'.

Dimaksudkan sistem hukum dalam penelitian ini lebih mengarah kepada teori Budaya (*tradisi*). Istilah tradisi banyak digunakan seperti menyebutkan; tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi sunda, tradisi pesantren dan lainnya. Yang mana masing-masing identitas mempunyai arti dan kedalaman makna tertentu. Tetapi istilah tradisi biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan yang diikuti dan digunakan bahkan dipertahankan oleh kelompok tertentu.<sup>22</sup>

Secara terminologis tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan anatara masa lalu dan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Ketika orang membicarakan tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang, Oleh karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditansmisikan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

<sup>23</sup> Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 4.

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradis tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Karenanya, bisa dikatakan adat atau tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas. Begitu pun tradisi perjodohan dan pelaksanaan *kafaa'ah* dalam perkawinan di Pondok Pesantren Miftahul Al-Musri' mempunyai ciri khas dan kebiasaan sendiri yang telah menjelma sebagai norma tau nilai, sebagai pegangan.

Dari kerangka pemikiran di atas, dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat digambarkan dengan skema di bawah ini:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran